

Judul : Minta KPK Tak Diskreditkan Ketua DPR
Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Surat Kabar : Jakarta Post
Halaman : 3

Minta KPK Tak Diskreditkan Ketua DPR

JAKARTA-Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menciptakan polemik opini terkait ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo sebagai saksi kasus eKTP, Senin (4/6). Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, KPK seharusnya dapat memahami ketidakhadiran Bambang lantaran padatnya kegiatan kelembagaan yang sudah terjadwal sebelumnya.

"Ketidakhadiran Ketua DPR memenuhi panggilan KPK hari ini (kemarin, Red) dikarenakan Ketua DPR harus memenuhi ke-

giatan kelembagaan DPR yang sudah terjadwal sejak jauh hari. Dan seharusnya bisa dipahami oleh KPK dan tidak menjadikannya sebagai polemik opini seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK ke media massa dengan tuduhan opini Ketua DPR tidak patuh hukum," tegas Masinton.

Masinton mengingatkan, dalam KUHAP jelas diatur mekanisme pemanggilan terhadap saksi mengenai pemanggilan ada pertama, kedua dan ketiga hingga upaya pemanggilan paksa.

Politisi PDIP ini meminta KPK dapat menertibkan jajarannya un-

tuk tidak membuat opini terkait pemanggilan saksi dalam kasus yang ditangani. "KPK berpedoman saja pada mekanisme KUHAP bukan bermain opini yang mendiskreditkan Ketua DPR. Pimpinan KPK harus menertibkan personil institusinya agar tidak liar, menjaga tertib hukum dan kondusif," ucap Masinton.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton mengingatkan pimpinan KPK selaku unsur penanggung jawab utama yang mengepalai institusi/lembaga KPK seharusnya mengerti etika kelembagaan negara.

Pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Bamsoet yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR dinilai Masinton seharusnya disampaikan langsung oleh pimpinan KPK dan bukan selevel juru bicara. "Apalagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara KPK sungguh tidak memahami tugas-tugas kelembagaan DPR yang sedang dilaksanakan oleh Mas Bamsoet sebagai Ketua DPR," tukasnya. (aen)